



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TRISNO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **801725**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.273.105.000**

1. Tanah Seluas 5887 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/99 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 275.238.000
3. Tanah Seluas 2516 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.867.000
4. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/120 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.610.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 3127 m2/210 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **471.000.000**

1. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, ISUZU TBR 54F TURBO LS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ GKS 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 43.108

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.806.648.108

III. HUTANG Rp. 175.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.631.648.108

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.